

Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi

Siti Novsa Nurkhalisa

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: sitinovsanurkhalisa17@gmail.com

Darmo H Suwiryo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: darmo1959@gmail.com

Evi Martaseli

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: evimartaseli@yahoo.com

Alamat: Jl.R.Syamsudin,S.H No.50 Cikole, Kec,Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Korespondensi Penulis: sitinovsanurkhalisa17@gmail.com

Abstract. Siti Novsa Nurkhalisa (1930611027) Muhaamadiyah University, Sukabumi. Analysis of Expenditure Budget Performance at the General Election Commission of Sukabumi Regency (Supervisors Dr.Darmo H Suwiryo.,S.E.,M.M and Evi Martaseli.,S.E.,M.Ak). The purpose of this research is to evaluate how well the spending budget has performed. The variables employed in this research are qualitative, and descriptive methods are used to obtain the data. These approaches include observation, interviews, and recording of the Sukabumi Regency KPU spending budget realization report. In this instance, the government carries out the obligations and responsibilities that must be met in order to produce performance that has an effective and efficient end result, and it is obvious that it must pay attention to the standard of the Sukabumi Regency General Election Commission's performance. The results of this study are that spending in the 2021-2022 LRA always shows changes in the evaluation of the spending budget, but in 2022 after entering the 2024 election stage the budget in the Sukabumi Regency KPU has a discrepancy in budget realization due to different or additional policies activities outside of planning so that they always revise the budget and the ceiling in 2022 has decreased compared to 2021 as a result of this planning. So it is hoped that in the following year it can be even better so as not to burden the financial team at the Sukabumi Regency KPU.

Keywords : Analysis of Performance, budget, spending.

Abstrak. Siti Novsa Nurkhalisa (1930611027) Universitas Muhaamadiyah Sukabumi. Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi (Pembimbing Dr.Darmo H Suwiryo.,S.E.,M.M dan Evi Martaseli.,S.E.,M.Ak). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja anggaran belanja. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dan metode deskriptif digunakan untuk memperoleh data. Pendekatan ini meliputi observasi, wawancara, dan pencatatan laporan realisasi anggaran belanja KPU Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini, pemerintah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi agar menghasilkan kinerja yang memiliki hasil akhir yang efektif dan efisien, dan jelas harus memperhatikan standar kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Hasil penelitian ini yaitu belanja pada LRA tahun 2021-2022 selalu menunjukkan perubahan dalam evaluasi anggaran belanja, namun di tahun 2022 setelah memasuki tahapan pemilu 2024 anggaran yang ada di KPU Kabupaten Sukabumi terdapat ketidak sesuaian pada realisasi anggaran dikarenakan terdapat kebijakan-kebijakan yang berbeda atau tambahan kegiatan di luar perencanaan sehingga selalu melakukan revisi anggaran dan pagu di tahun 2022 mengalami penurunan di dibandingkan pada tahun 2021 yang di akibatkan perencanaan tersebut. Sehingga diharapkan di tahun selanjutnya bisa lebih baik lagi supaya tidak memberatkan tim keuangan yang ada di KPU Kabupaten Sukabumi.

Kata Kunci : Analisis Kinerja, Anggran, Belanja.

PENDAHULUAN

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2016, pemerintah melaksanakan reformasi di bidang anggaran baik dari segi belanja, pendapatan maupun pembiayaan. Peningkatan akuntabilitas, kualitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari reformasi keuangan negara.

Setiap instansi pemerintahan yang ditugaskan untuk melaksanakan reformasi keuangan negara bertanggung jawab untuk mengelola keuangannya sendiri, salah satunya dilakukan dengan teknik modern penganggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting/PBB*), yang didasarkan pada tujuan rencana kerja pemerintah (RKP). penganggaran sekarang menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada hasil sebelumnya. Dengan melakukan perubahan ini, KPU RI diberikan intensif yang kuat pemerintah untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara lebih efektif, efisien dan produktif, namun tetap memenuhi kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat dalam batas - batas sumber pendanaan yang ada. Pengungkapan keuangan menunjukkan bagaimana entitas pemerintah melaksanakan anggaran mereka. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang merinci semua tindakan pelaksanaan anggaran, disertakan dalam laporan keuangan berikutnya dan dipublikasikan sebagai tinjauan atas kinerja keuangan. (Syamsuddin et al., 2022)

Entitas pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk mengelola dan membelanjakan anggaran sesuai dengan tujuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) masing-masing. Karena kegiatan anggaran merupakan evaluasi dan pengukuran atas pelaksanaan atau realisasi anggaran yang dituangkan melalui laporan keuangan, maka tidak dapat dipisahkan dengan dana anggaran dalam pengelolaan dana anggaran. (Grandy, 2015)

Keuangan publik dikelola oleh lembaga pemerintah, yang tanggung jawab utamanya adalah melayani kepentingan publik. Dana anggaran yang direalisasikan untuk kepentingan publik dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola, dan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya diawasi untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tersebut efektif, efisien, dan terfokus pada kepentingan publik. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkannya dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Kualitas dan kuantitas hasil kerja (output) yang dicapai Sumber Daya Manusia (SDM) per satuan waktu dalam melaksanakan kewajiban kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dapat disimpulkan sebagai kinerjanya. Menurut (A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, n.d.) Kinerja perusahaan dapat didefinisikan

sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu sasaran, tujuan, visi dan misi perusahaan dalam mewujudkan sasaran, misi dan tujuan perusahaan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam strategi plan perusahaan. Kata "kinerja" sering digunakan untuk menggambarkan pencapaian atau tingkat keberhasilan dalam hal tujuan atau target yang terukur. Tidak memiliki rencana atau arah. Ketika standar yang digunakan untuk mengukur keberhasilan seseorang atau perusahaan.

Penelitian ini bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi merupakan kabupaten terluas kedua di pulau Jawa setelah Banyuwangi Jawa Timur. Karena populasinya tahun ini memiliki jumlah penduduk 2.851.890 jiwa. Dan terbagi menjadi 6 Daerah Pemilih, 47 Kecamatan, 5 kelurahan dan 381 desa. Meski berpenduduk 2.851.890 jiwa, tetapi jumlah data pemilih di kabupaten sukabumi sebanyak 1.997.822 jiwa pemilih laki-laki 1.009.907 dan perempuan 987.915 sebagai pemilih sah yang berhak memilih yang diselenggarakan oleh KPU. KPU sendiri merupakan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu di era orde baru. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017. KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional.(Sukabumi, n.d.)

Penelitian ini difokuskan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi dipilih karena merupakan kementerian atau lembaga yang bertindak atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi juga bertanggung jawab dalam mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang keduanya diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja KPU Kabupaten Sukabumi.

Fenomena yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yaitu, keterlambatan disaat pengajuan anggaran dana atau anggaran belanja yang disebabkan oleh penggunaan anggaran yang tidak sesuai atau sejalan dengan perencanaan, sehingga terjadinya revisi anggaran yang sering dilakukan dan tidak terjadwal. Sampai pada saat pelaporan pertanggung jawaban keuanganpun menjadi terhambat sehingga terlambat pelaporan. Dan juga tentang realisasi penggunaan anggaran belanja yang masih terdapat penurunan (Sumber : Staff Perencanaan Data dan Informasi).

Tabel 1**Pagu, Realisasi dan persentase Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi**

| Tahun | 2021 | 2022 |
|--------------|-------------------|------------------|
| Pagu | Rp.11.980.898.000 | Rp.5.064.452.000 |
| Realisasi | Rp.11.961.515.536 | Rp.5.031.220.825 |
| Persentase | 99.84% | 99.34% |

Sumber : Omspan KPU Kabupaten Sukabumi

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa pagu, realisasi dan persentase dari tahun 2021 mengalami penurunan di tahun 2022. Di karenakan di setiap tahapan memiliki perbedaan penggunaan anggaran. Pada tahun 2021 itu belum masuk ke tahapan pemilu, tetapi di tahun 2022 itu sudah masuk ke tahapan pemilu yang menjadi membedakannya yaitu di tahun 2021 hanya anggaran rutin saja berbeda dengan di tahun 2022 maka dari itu persentase realisasi di tahun 2022 mengalami penurunan karena terdapat perbedaan kebutuhan anggaran di tahun 2022 itu lebih banyak beban anggarannya di bandingkan dengan tahun 2021. Karena untuk pengajuan anggaran itu sama setiap satu tahun sekali dan template yang sudah di sediakan oleh KPU RI, jadi meskipun belum masuk tahapan atau sudah memasuki tahapan untuk pemilu tamplatnya tetap sama yang sudah diberikan oleh KPU RI.

Maka dari itu perlu di perhatikan kinerja anggaran belanja di sebuah instansi itu sangat penting, sebagai kinerja yang penuh tanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan anggaran belanja di instansi. Karena jika terdapat kesalahan sedikitpun akan menjadi fatal.

Meneliti tentang analisis kinerja anggaran belanja itu sangat penting karena karena kita bisa tau kinerja di sebuah instansi dan juga penting untuk memastikan penggunaan dana yang tepat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran dan memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi di sebuah instansi lebih tepatnya di KPU Kabupaten sukabumi.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis perencanaan anggaran belanja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
2. Untuk menganalisis pengajuan anggaran dana atau belanja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

3. Untuk menjelaskan revisi anggaran belanja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

4. Untuk menjelaskan evaluasi anggaran belanja yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemilu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 15 Tahun 2011. Di sini, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota didefinisikan. KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan pemilu di provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (7), sedangkan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab melaksanakan pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (8). Pemerintah pusat di Indonesia membentuk lembaga-lembaga yang terpisah, namun beroperasi secara otonom.

Selain itu, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), sebuah organisasi yang tidak memihak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dll. KPU adalah komisi negara yang dimaksudkan untuk melengkapi lembaga pemerintah utama. Oleh karena itu, perspektif KPU tidak dapat diselaraskan dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ditetapkan oleh UUD 1945. Lembaga pemerintah yang membantu pemerintah disebut sebagai "lembaga pemerintah bantu". Salah satu cara agar kualitas pemilu dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu adalah melalui penyelenggaraan pemilu yang lebih baik. Peran KPU sebagai penyelenggara pemilu mengharuskannya untuk bersikap netral dan non-partisan.

Akuntansi Sektor Publik

The American Accounting Association (AAA) mendefinisikan akuntansi sebagai "seni dan ilmu mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan keuangan dan informasi relevan lainnya secara tepat waktu untuk memungkinkan pengguna membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang terinformasi." Bagian kedua dari definisi akuntansi menurut American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) adalah proses pencatatan dan pengikhtisaran peristiwa keuangan dan interpretasi transaksi yang dihasilkan dalam bentuk uang.

Akuntansi, menurut dua sumber yang dikutip di atas, hanyalah sebuah proses yang dimulai dengan mengidentifikasi, mengukur, mencatat, dan melaporkan berbagai informasi keuangan yang akan digunakan untuk penilaian dan pengambilan keputusan. Akuntansi kadang-kadang disebut sebagai "bahasa bisnis" karena kegunaannya dalam mentransmisikan informasi kepada pemangku kepentingan termasuk manajemen, investor, kreditur, dan regulator tentang kinerja ekonomi perusahaan. Selain itu, banyak orang awam percaya bahwa akuntansi berhubungan dengan banyak bentuk matematika. Namun, akuntansi sebagai disiplin jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Semakin banyak orang yang tertarik mempelajari akuntansi sebagai hasil dari perluasan bidang pengetahuan.

Akuntansi di sektor publik secara substansial berbeda dengan di sektor swasta. Perbedaan ini didasarkan pada jenis organisasi atau departemen pemerintah yang mengadopsi metode pembukuan ini. Entitas pemerintah adalah fokus utama akuntansi sektor publik.

Akuntansi di sektor publik mengacu pada organisasi yang pekerjaannya difokuskan untuk menyediakan warga negara dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan. Ada banyak cara di mana institusi publik dapat dibandingkan dengan mitra sektor swasta mereka. Kedua peran menggunakan mekanisme dan sistem kontrol yang sama. Namun, tidak seperti operasi pemerintah, sektor publik tidak dapat dialihdayakan dalam semua kasus. Menurut mereka yang tahu, akuntansi sektor publik terlihat seperti ini :

1. Indra Bastian (2014:6)

Akuntansi di sektor publik memerlukan penerapan mekanisme teknologi dan analisis akuntansi pada administrasi keuangan publik yang beragam oleh lembaga-lembaga tingkat negara dan departemen-departemen di bawahnya.

2. Mardi Gras (2015, 14 April)

Akuntansi sektor publik, dalam pandangan Mardiasmo, adalah alat manajemen pemerintah atau informasi yang berguna bagi publik.

Untuk memberikan informasi keuangan kuantitatif berdasarkan entitas pemerintah yang berguna dalam membuat pilihan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa, seperti yang dinyatakan oleh

3. Halim (2014:18).

Akuntansi sektor publik, seperti yang didefinisikan oleh Erlina (2015), adalah praktik pencatatan transaksi keuangan di dalam suatu lembaga, seperti lembaga pemerintah, nirlaba, atau lembaga pendidikan.

Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dibagi menjadi beberapa jenis diantaranya :

1. Akuntansi Pemerintah (*Governmental Accounting*)

Informasi akuntansi digunakan untuk mendidik cabang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan warga negara tentang kegiatan ekonomi dan keuangan pemerintah Akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah adalah dua subbidang utama akuntansi pemerintah. Akuntansi provinsi berbeda dengan akuntansi kabupaten atau kota, yang masih menjadi standar.

2. Akuntansi Sosial (*Sosial Accounting*)

Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi yang mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non profit dan nirlaba yang dijalankan khusus untuk lembaga masyarakat lainnya.

Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Perkembangan akuntansi sektor publik dibantu oleh pengenalan sejumlah elemen. Aspek pertama adalah bahwa Indonesia memiliki bentuk pemerintahan parlementer. Sebagai hasilnya, sebuah sistem akuntansi sektor publik dikembangkan, yang implementasinya tunduk pada pengaruh lembaga eksekutif dan legislatif dalam sebuah sistem check and balance. Hubungan tidak langsung antara sumber daya dan hasil adalah pertimbangan kedua. Akhirnya, iklim politik negara juga berpengaruh karena mendorong pembicaraan antara lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif.

Definisi Perencanaan

Perencanaan anggaran merupakan apa yang di butuhkan oleh instansi dalam mendukung tugas dan fungsinya, bukan apa yang diinginkan oleh siapapun di instansi tersebut sehingga dalam merencanakan keuangan harus mengacu pada apa saja yang memang di butuhkan oleh instansi tersebut.(Indonesia, n.d.)

Perencanaan anggaran yaitu proses mengidentifikasi, mengestimasi, dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai tujuan instansi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari perencanaan anggaran adalah mengendalikan pengeluaran dan memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.

Perencanaan anggaran juga dapat membantu instansi untuk memiliki gambaran yang lebih jelas tentang penggunaan dana KPU Kabupaten Sukabumi, menghindari keborosan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Definisi Pengajuan Anggaran

Ketika kebutuhan keuangan suatu program telah diidentifikasi, kebutuhan tersebut harus diajukan sebagai bagian dari proses perencanaan. Baik organisasi publik maupun swasta mau tidak mau harus mengeluarkan uang tunai untuk menutupi pengeluaran yang tidak dapat dihindari. Pengeluaran tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan operasi. Perusahaan beroperasi dengan fokus untuk menghasilkan keuntungan, sedangkan organisasi pemerintah bertugas untuk menjaga kepentingan publik. Perolehan sumber daya keuangan diperlukan untuk membiayai operasi yang dilakukan sehingga uang tersedia untuk mengganti pengeluaran yang dibayarkan. (Utara, n.d.)

Pengajuan anggaran merupakan proses formal dimana instansi mengajukan permohonan untuk mendapatkan alokasi dana atau anggaran untuk kegiatan atau proyek tertentu. Tujuan pengajuan anggaran adalah untuk memperoleh persetujuan dan dukungan keuangan untuk melaksanakan rencana atau inisiatif yang direncanakan.

Pengajuan anggaran juga merupakan langkah penting dalam mengamankan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan atau proyek tertentu. Dalam proses ini, penting untuk menyusun anggaran yang jelas, terperinci, dan meyakinkan, serta dapat mendemonstrasikan nilai tambah dan dampak positif dari penggunaan dana yang diajukan.

Definisi Pelaksanaan atau Realisasi Anggaran

Tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (realisasi). (NTB, n.d.) Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, semuanya dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode waktu tertentu dalam dokumen yang disebut Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (bantenprov.go.id). data yang komprehensif tentang realisasi anggaran, alokasi, dan evaluasi kinerja pelaporan dapat diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). (Konsul & Ting, n.d.)

Pelaksanaan atau realisasi anggaran mengacu pada tahap di mana alokasi dana yang telah disetujui dalam anggaran digunakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan implementasi kegiatan, pengeluaran dana, dan pemantauan pelaksanaan anggaran secara berkala.

Pelaksanaan atau realisasi anggaran merupakan tahap krusial dalam siklus anggaran yang melibatkan implementasi nyata dari rencana keuangan yang telah disetujui. Penting untuk memastikan bahwa pengeluaran dana dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan

peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran tersebut.

Definisi Evaluasi Kinerja Anggaran

Mengukur, menelaah, dan menganalisis kinerja anggaran tahun fiskal berjalan dan tahun fiskal sebelumnya untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja anggaran merupakan proses yang dikenal dengan evaluasi kinerja anggaran, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu mengukur, mengevaluasi, dan menganalisis kinerja anggaran untuk memberikan saran-saran untuk meningkatkan kinerja anggaran. (RI, n.d.)

Evaluasi kinerja anggaran merupakan proses untuk mengevaluasi pencapaian tujuan keuangan dan non-keuangan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Tujuan utama dari evaluasi kinerja anggaran yaitu untuk menilai sejauh mana anggaran telah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi peluang perbaikan untuk pengelolaan keuangan di masa depan.

Evaluasi kinerja anggaran penting dalam siklus anggaran karena memberikan umpan balik dan wawasan tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan dana, serta membantu dalam mengarahkan.

Definisi Kinerja

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dihasilkannya dalam melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kinerja SDM didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh SDM per satuan waktu dalam melaksanakan kewajiban kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. (A.A Anwar Prabu Mangkunegara, n.d.)

Kinerja mengacu pada hasil atau pencapaian seseorang, tim, instansi, atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penilaian terhadap bagaimana individu atau entitas melaksanakan tugas, menghasilkan output, atau menjalankan proses dalam konteks yang telah ditentukan.

Kinerja dapat diukur dalam berbagai konteks, termasuk kinerja individu, kinerja tim, kinerja instansi, kinerja finansial, kinerja proyek, atau kinerja sistem yang lebih luas. Evaluasi kinerja memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik yang berharga, mendorong perbaikan berkelanjutan, dan memastikan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Definisi Kinerja Anggaran

Keuangan publik dikelola oleh lembaga pemerintah, yang tanggung jawab utamanya adalah melayani kepentingan publik. Dana anggaran yang direalisasikan untuk kepentingan publik dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola, dan kinerja pemerintah dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dimonitor untuk memastikan bahwa realisasi anggaran tersebut efisien, efektif, dan terfokus pada kepentingan publik. Supramoko (2000:53) menjelaskan anggaran pada hakekatnya merupakan kerangka kerja untuk perencanaan dan penyelenggaraan anggaran daerah yang menitikberatkan pada kinerja atau hasil. Kepentingan publik menghendaki agar kinerja tersebut secara akurat merepresentasikan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik (2000, n.d.)

Kinerja anggaran merujuk pada evaluasi pencapaian tujuan keuangan yang telah ditetapkan dalam anggaran yang telah disusun. Ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana alokasi dana dan penggunaan anggaran telah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja anggaran penting untuk memastikan bahwa anggaran digunakan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Melalui evaluasi kinerja anggaran, organisasi dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan keuangan di masa mendatang.

Definisi Kinerja Anggaran Belanja

Mahsun (2009 : 25) kinerja (performa) adalah gambaran mengenai tingkat pencatatan pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi *planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau strategi, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Kinerja anggaran belanja merujuk pada evaluasi pencapaian tujuan yang terkait dengan pengeluaran atau belanja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Ini melibatkan penilaian terhadap sejauh mana penggunaan dana belanja telah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pengeluaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja anggaran belanja penting untuk memastikan bahwa penggunaan dana belanja dilakukan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Melalui evaluasi kinerja anggaran belanja, organisasi dapat memperoleh wawasan yang berharga untuk meningkatkan perencanaan dan pengelolaan belanja di masa mendatang. (Mahsun, n.d.)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu untuk menggambarkan atau mengetahui realisasi peristiwa yang diteliti. Sehingga dapat memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang bersifat objektif untuk mengetahui

bagaimana pelaksanaan Kinerja Anggaran Belanja dalam perencanaan anggaran KPU Kabupaten Sukabumi.

Menurut Sugiyono (2020:8-9), Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan Teknik pengumpulan data, reduksi data, data *display* dan verifikasi (penarikan kesimpulan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi merupakan kementerian atau lembaga yang mewakili kementerian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Lembaga Legislatif dan Yudikatif, serta pemilihan umum kepala daerah

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berada di kabupaten sukabumi, berlokasi di Jl.Siliwangi No.92 Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi 43351.

Visi Misi KPU Kabupaten Sukabumi

Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Misi

1. Untuk itu, kita harus: mengembangkan regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi, dan profesionalitas penyelenggara pemilu melalui penguatan kode etik penyelenggara pemilu; dan
3. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan mudah diakses.
4. Kualitas pelayanan pemilu harus ditingkatkan untuk kepentingan semua pihak yang terlibat.

5. meningkatkan jumlah dan kualitas pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu, demi terciptanya negara yang lebih aman dan sejahtera.
6. memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Tugas Pokok dan Fungsi

Anggota KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi di KPU Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik

Mempunyai tugas, wewenang dan kewajibannya mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan,
- Protokol dan persidangan
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara,
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan
- pelaporan keuangan, Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota, dan
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :

- Sosialisasi kepemiluan,
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilihan,
- Kerjasama antar lembaga, dan
- Pengelolaan dan penyediaan informasi publik,
- Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS,
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia,
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi,
- Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia,
- Penelitian dan pengembangan kepemiluan, dan
- Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Menjabarkan program dan anggaran,
- Evaluasi, penelitian, dan pengendalian program dan anggaran,
- Pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih,
- Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu,
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi,
- Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi,
- Verifikasi partai politik dan anggota DPD,
- Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan,
- Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara,
- Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan,
- Pelaporan dana kampanye, dan
- Penggantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

5. Divisi Hukum dan Pengawasan

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota,
- Telaah hukum dan advokasi hukum,
- Dokumentasi dan publikasi hukum,
- Pengawasan dan pengendalian internal,
- Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan, dan
- Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Sukabumi dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi. Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU Kabupaten Sukabumi. Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi di pimpin oleh

Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi. Sekretaris KPU Kabupaten Sukabumi bertanggung jawab secara fungsional kepada ketua KPU Kabupaten Sukabumi, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi.

Analisis Perencanaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Perencanaan anggaran belanja, memiliki tugas utamanya yaitu merencanakan dan mengelola anggaran belanja untuk suatu instansi atau entitas. Dan terdapat langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses perencanaan diantaranya yaitu :

1. Mengumpulkan data

Mengumpulkan data atau mengumpulkan informasi yang relevan, termasuk data historis tentang pengeluaran sebelumnya, rencana kegiatan dan proyeksi masa depan, kebijakan anggaran, dan sumber pendanaan yang tersedia.

2. Menetapkan tujuan

Bekerja dengan manajemen atau pihak yang bertanggungjawab untuk menetapkan tujuan anggaran belanja. Tujuan ini dapat berupa penghematan, efisiensi operasional, atau pengembangan program baru.

3. Menganalisis dan merencanakan

Melakukan analisis menyeluruh terhadap data yang dikumpulkan.

4. Mengalokasikan anggaran

Setelah merencanakan anggaran belanja, alokasikan dana ke berbagai program, proyek, atau kegiatan yang relevan.

5. Memantau dan mengelola

Perencanaan anggaran bukanlah tugas selesai begitu saja tapi harus secara teratur memantau pengeluaran aktual dan membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi dan penyesuaian

Secara berkala evaluasi kembali anggaran belanja dan hasilnya. Tinjau efektivitas pengeluaran dan pencapaian tujuan.

Analisis Sistem Pengajuan Dana atau Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Sistem pengajuan dana atau belanja untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabumi dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU RI. Namun, umumnya proses pengajuan dana atau belanja melibatkan langkah-langkah berikut :

1. Persiapan Anggaran

KPU Kabupaten Sukabumi selalu menyiapkan anggaran tahunan sesuai dengan template dari KPU RI untuk mencakup berbagai kegiatan selama tahapan pemilu tahun 2024 di 2022, termasuk penganggaran barang, modal dan kebutuhan pegawai,

2. Penyusunan rencana kegiatan

Setelah anggaran disetujui dan bisa di cairkan dari KPPN KPU Kabupaten Sukabumi akan menyusun rencana kegiatan yang sudah ada di timeline KPU RI yang akan dilakukan selama satu tahun dan rencana kegiatan ini harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Terkadang di KPU Kabupaten Sukabumi terdapat kegiatan mendadak dari intruksi KPU RI sehingga kegiatan tersebut di luar rencana kegiatan kerja.

Analisis Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Anggaran belanja KPU digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait pemilu 2024, seperti :

1. Penyelenggaraan pemilihan umum

Anggaran dapat digunakan untuk membiayai proses pemilihan umum di tingkat kabupaten sukabumi, tidak hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi termasuk pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan lainnya. Anggaran dapat digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan seperti pemuktahiran data pemilih, pengadaan logistik pemilihan, pelatihan petugas dan pengoprasian tempat pemungutan suara.

2. Sosialisasi dan edukasi pemilih

Anggaran juga dapat dialokasikan untuk program sosialisasi dan edukasi pemilih. Ini termasuk kegiatan seperti penyuluhan pemilih, kampanye kesadaran pemilih, penyebaran informasi tentang proses pemilihan, dan pendidikan pemilihan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran pemilih.

3. Pengadaan dan pemeliharaan teknologi pemilihan

Anggaran dapat digunakan untuk mengadakan dan pemeliharaan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung teknologi pemilihan, seperti mesin pemilih elektronik, sistem verifikasi pemilih, sistem penghitungan suara, pengoprasian SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) dan SILON (Sistem Informasi Pencalonan).

4. Operasional dan administrasi

Sebagian anggaran belanja juga dapat dialokasikan untuk operasional dan administrasi harian KPU Kabupaten Sukabumi, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan

pegawai, sewa kantor, pengelolaan keuangan, uang makan pegawai dan kegiatan rutin lainnya. Tetapi balik lagi kepada satker dan persetujuan dari inspektorat RI.

5. Pengawasan penegakan hukum

Sebagian anggaran juga dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengawasan pemilihan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilihan umum, seperti investigasi kecurangan pemilihan, penanganan sengketa pemilihan, dan pengaduan masyarakat. Untuk pengawasan Pemilu itu diawasi oleh bawaslu, panwas untuk tingkat kecamatan dan PKD untuk tingkat desa.

Analisis Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Evaluasi penggunaan anggaran belanja KPU Kabupaten Sukabumi, namun evaluasi penggunaan anggaran belanja umumnya dilakukan melalui proses audit internal dan eksternal. Berikut adalah beberapa hal yang biasanya di evaluasi diantaranya :

1. Kepatuhan terhadap aturan dan prosedur

Evaluasi akan memeriksa apakah penggunaan anggaran belanja KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan aturan, peraturan, dan prosedur berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap ketentuan hukum, peraturan pengelolaan keuangan negara, dan pedoman yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

2. Efisiensi dan efektivitas

Evaluasi akan mengevaluasi sejauh mana penggunaan anggaran belanja KPU Kabupaten Sukabumi efisien dan efektif. Ini mencakup penilaian terhadap pengeluaran yang dilakukan, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh, dan apakah sumber daya manusia yang digunakan secara optimal.

3. Transparansi dan akuntabilitas

Evaluasi akan melihat transparansi dalam penggunaan anggaran, termasuk pelaporan yang tepat waktu dan akurat tentang pengeluaran serta keterbukaan informasi kepada publik. Akuntabilitas juga akan di evaluasi, termasuk penelusuran penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban yang tepat.

4. Pengawasan internal

Karena untuk permasalahan anggaran dan yang pemegang anggaran bersifat sensitif, jadi evaluasi akan meninjau sistem pengawasan internal yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi untuk memastikan penggunaan anggaran belanja yang baik.

5. Audit eksternal

Evaluasi juga dapat melibatkan audit eksternal oleh pihak ketiga independen. Audit ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran secara objektif dan menyediakan rekomendasi untuk perbaikan jika ditemukan kelemahan atau ketidakpatuhan. Dan biasanya KPU kabupaten sukabumi selalu di evaluasi setiap akhir tahun oleh inspektorat RI dan bagian keuangan oleh KPA atau Kuasa Penggunaan Anggaran atau biro keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan pada bagian pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

diintansi sebelum melakukan pengajuan anggaran yang tentunya harus merencanakan anggaran supaya bisa sesuai apa yang dibutuhkan diintansi tersebut, tetapi di KPU Kabupaten Sukabumi sendiri masih terdapat ketidaksesuaian apa yang direncanakan karena peneliti membahas pada tahun 2021 dan 2022 di tahun 2022 itu sudah memasuki tahapan pemilu 2024 yang mana perencanaan anggaran belanja tersebut terdapat perbedaan di tahun 2021. pada tahun 2022 lebih banyak pengeluaran untuk kebutuhan atau kegiatan yang dijalani, yang bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang intruksikan dari KPU RI untuk KPU Kabupaten atau kota untuk mengadakan kegiatan yang mendadak yang pastinya keluar dari rencana anggaran. Maka dari itu perencanaan anggaran di tahun 2022 masih terdapat ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan yang sudah diajukan selama satu tahun.

2. Sistem Pengajuan Anggaran Belanja atau Dana KPU Kabupaten Sukabumi

proses pengajuan anggaran dana atau belanja KPU Kabupaten Sukabumi dapat mengalami variasi dan penyesuaian tertentu tergantung pada peraturan dan kebijakan satker atau KPU RI.

3. Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Penggunaan anggaran belanja KPU kabupaten sukabumi pasti berbeda di tiap tahunnya dan sesuai tahapan pemilu serta tergantung pada prioritas dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan peraturan atau kebijakan yang berlaku dari KPU RI. Untuk penggunaan anggaran sesuai apa yang sudah disampaikan oleh informan itu terkadang sudah sesuai tetapi ketika ada kegiatan tambahan yang diluar perencanaan maka anggarannya menjadi mines yang diakibatkan kegiatan tambahan tersebut, dan menjadi tugas tambahan kepada pengelola keuangan.

Dan tidak jarang pula anggaran pasti selalu di revisi oleh tim keuangan sebagai salah satu penyebabnya. Juga untuk pelaksanaan revisian yang kadang tidak terjadwal yang

disebabkan KPU RI yang masih sibuk mengurus tahapan pemilu 2024 jadi pelaksanaan revisi anggaran tidak terjadwal.

4. Evaluasi Penggunaan Anggaran Belanja KPU Kabupaten Sukabumi

Evaluasi penggunaan anggaran KPU kabupaten sukabumi biasanya dilakukan secara rutin setiap triwulan atau akhir tahun pada saat akan melaporkan hasil laporan keuangan di evaluasi oleh KPA untuk tim keuangan dan untuk perencanaan data dan informasi itu langsung di review oleh inspektorat RI. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengelolaan anggaran, memperbaiki proses, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

- 2000, S. (n.d.). Supramoko.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (n.d.).
<https://scholar.google.com/citations?user=NLP0XscAAAAJ&hl=en&oi=sra>.
- <https://scholar.google.com/citations?user=NLP0XscAAAAJ&hl=en&oi=sra>
- Grandy, B. (2015). Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara TAHUN 2010-2014.
- Indonesia, K. K. R. (n.d.). <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>
- Konsul, & Ting, T. (n.d.). <https://trierconsulting.com/apa-saja-yang-harus-ada-dalam-laporan-realisisi-anggaran/>.
<https://trierconsulting.com/apa-saja-yang-harus-ada-dalam-laporan-realisisi-anggaran/>
- Mahsun. (n.d.). Mahsun 2009.
- RI, K. H. dan H. (n.d.). <https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5336-subbag-program-dan-perencanaan-ikuti-giat-optimalisasi-nilai-kinerja-anggaran-pada-aplikasi-smart#:~:text=Evaluasi%20Kinerja%20Anggaran%20adalah%20proses,dalam%20rangka%20Peningkatan%20kiner>.
- Sukabumi, I. (n.d.). <https://sukabumikab.go.id/web/>. <https://sukabumikab.go.id/web/>
- Syamsuddin, I., Muhammad, P. N., & Karim, A. (2022). Journal of Management Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018-2020. YUME : Journal of Management, 5(2), 170–177. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i2.1557>
- Utara, U. S. (n.d.). repositori.usu.ac.id.